



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Telepon 512688, 512820 Fax. 580692



PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TERHADAP BAHAN ACARA NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 – 2022

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari Kamis, Tanggal 1 Maret 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera untuk kita sekalian

Yang terhormat, Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya.

Yang terhormat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami hormati, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah beserta para Asisten Sekretaris Daerah

Yang kami hormati, Pimpinan OPD di Lingkungan Pemda DIY

Yang kami hormati, rekan-rekan Anggota Dewan

Yang kami hormati, rekan-rekan pers dan media massa

beserta para hadirin sekalian

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai GOLKAR untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Gubernur DIY yang telah menghantarkan dan menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas pada rapat paripurna Dewan tanggal 26 Februari 2018 yang lalu.

Pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPP) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 tahun setelah pelantikan Gubernur, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Rapat paripurna yang terhormat,

Setelah mendengarkan dan mencermati naskah penghantaran dan penjelasan Gubernur serta Rancangan Akhir RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022, ada sejumlah hal yang FPG mohonkan penjelasan, yaitu:

1. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh eksekutif, sampai dengan akhir pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017, sudah berapa persenkah target RPJPD DIY 2005 – 2025 yang telah dapat dicapai?

Dan untuk RPJMD 2017 – 2022, berapa persenkah target RPJPD DIY yang hendak dicapai?

Terutama yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat?

Mohon penjelasan!

2. Sampai dengan tahun 2025 mendatang, seluruh gerak pembangunan di DIY harus selalu mengacu atau mendasarkan pada RPJPD yang saat ini masih berlaku. Dan dari satu RPJMD ke RPJMD berikutnya harus terus nyambung. Artinya, RPJMD Tahun 2017–2022 harus juga mengacu dan mengevaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2012–2017, walaupun substansi dan penekanannya disesuaikan dengan perkembangan jaman dan prediksi atas kondisi-kondisi yang kemungkinan akan terjadi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Memperhatikan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Tahun 2012–2017, ada capaian-capaian yang baik dan ada pula hal-hal yang belum dapat dicapai. Terhadap hal-hal yang telah berhasil dicapai, hendaknya terus ditingkatkan pada masa lima tahun ke depan.

Sedangkan terhadap IKU yang pencapaiannya masih kurang optimal, yaitu Indeks Ketimpangan Antar Wilayah, Indeks Ketimpangan Pendapatan, Lama Tinggal Wisatawan Nusantara maupun Mancanegara, serta Load Factor Angkutan Perkotaan, haruslah menjadi perhatian sungguh-sungguh untuk terus diikhtiarkan penyelesaiannya pada pelaksanaan RPJMD 2017–2022. Kendala utamanya adalah masalah pemerataan, masalah lama tinggal wisatawan dan masalah penggunaan angkutan publik.

Terhadap capaian peningkatan Angka Harapan Hidup yang dapat melampaui target, Fraksi Partai GOLKAR memberikan apresiasi kepada Gubernur beserta seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemda DIY. Namun demikian, persoalan ikutan yang menyertai keberhasilan tersebut, yaitu terdapat lebih dari 30.000 lansia terlantar di DIY, harus juga dapat diselesaikan. Kalau masalah lansia terlantar tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka pencapaian Angka Harapan Hidup hanyalah akan menjadi kebanggaan semu bagi pemerintah daerah dan masyarakat DIY.

Masalah kemiskinan masih menjadi Pekerjaan Rumah yang berat bagi Pemda DIY. Sampai dengan tahun 2017, masih terdapat 488,5 ribu jiwa atau sekitar 12,36 persen penduduk DIY yang hidup dalam kondisi miskin. Persentase penduduk miskin DIY ternyata masih lebih tinggi dari persentase rata-rata penduduk miskin nasional sebesar 10,96. Idealnya, secara bertahap jumlah penduduk miskin di DIY harus mampu terus diturunkan pada jangka waktu lima tahun ke depan, sampai pada angka di bawah penduduk miskin secara nasional.

Terkait dengan kondisi penduduk miskin yang masih tinggi, ada sejumlah masalah yang harus terus diselesaikan. Masih terdapatnya belasan desa rawan pangan, adalah sesuatu hal yang menggelisahkan.

Peningkatan produktivitas berbagai komoditas pangan (padi, hortikultura, hasil perkebunan, peternakan) ternyata belum bisa menyelesaikan masalah rawan pangan di sejumlah desa. Padahal secara geografis, tidak ada lagi wilayah DIY yang tidak terjangkau transportasi yang menghambat distribusi pangan. Solusinya adalah supaya Pemda DIY lebih fokus lagi membuat program dan kegiatan dalam mengintervensi penyelesaian masalah tersebut.

Masalah-masalah lain yang terkait dengan kemiskinan masih cukup banyak. Lahan pertanian produktif yang terus menyusut karena alih fungsi, ketersediaan lapangan kerja yang belum sebanding dengan meningkatnya angkatan kerja, masih tingginya angka pernikahan di bawah umur dan melahirkan di usia remaja, masih terdapat anak putus sekolah. Semua masalah di atas menjadi penyebab kemiskinan, dan sebaliknya juga merupakan dampak dari kemiskinan itu sendiri. Saling terkait satu dengan yang lain. Penyelesaiannya harus komprehensif, dan melibatkan lintas sektor. Untuk menyelesaikannya harus ada langkah terpadu dari Pemerintah, Pemda DIY dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Secara umum Fraksi Partai GOLKAR mohon dijelaskan langkah-langkah kongkrit apa saja yang akan dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di atas?

3. Salah satu Indikator Kerja Utama (IKU) yang telah dirumuskan untuk mengukur capaian Visi dan Misi RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022 adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Terkait dengan masalah Lingkungan Hidup, DIY telah memiliki beberapa Peraturan Daerah. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Hal tersebut belum disinggung pada Rancangan Akhir RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022. FPG menilai Peraturan Daerah tersebut adalah salah satu dari banyak Peraturan Daerah yang belum terimplementasikan dengan baik.

Menurut data yang diperoleh, banyak instansi/industri penghasil limbah di DIY yang belum melakukan pengelolaan Limbah B3 dengan semestinya. Termasuk puluhan rumah sakit di DIY, belum melakukan pengelolaan Limbah B3. Limbah B3 yang dihasilkan konon masih ditumpuk di lingkungan rumah sakit. Kalau info ini benar, maka akan sangat membahayakan lingkungan hidup di sekitar rumah sakit. Mohon Pemda DIY dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan hal tersebut, bagaimana kebijakan Pemda DIY dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, sebagai bagian dari isu strategis Pembangunan Berkelanjutan?

4. Terkait dengan kemacetan yang sering terjadi, tidak mungkinkah Pemda DIY mengambil langkah-langkah strategis untuk segera menyelesaikannya? FPG mengusulkan agar di beberapa titik yang sering terjadi kemacetan, dapat dibuat simpang vertikal (jalan layang) secara bertahap. Titik-titik lokasi yang perlu mendapat perhatian utama adalah di Perempatan sebelah Monumen Jogja Kembali, Perempatan Jalan Kaliurang (Kentungan), Perempatan ring road Jalan Parangtritis, Perempatan ring road Jalan Wonosari (Ketandan). Jalan-jalan strategis yang menghubungkan/menuju destinasi wisata utama di Kota Yogyakarta juga perlu mendapatkan prioritas.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR. Hal-hal strategis lain akan disampaikan pada rapat-rapat kerja Panitia Khusus.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

Sekretaris,

JANU ISMADI, SE

NURJANNAH

Juru Bicara
